

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan suatu paradigma baru mengenai konsep pembangunan yang disebut dengan paradigma pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dari konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi adalah faktor penting dalam sebuah proses pembangunan, namun unsur tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mendorong kemajuan sebuah perekonomian. Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila setiap orang atau manusia memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan memiliki umur panjang, berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*, 1995:103), sejumlah konsep penting dalam pembangunan manusia adalah:

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep di atas, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Produktivitas

Penduduk harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia

2. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan

2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan manusia, pada tahun 1990 UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dalam *Human Development Report* (HDR). Indeks pembangunan manusia merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2016). IPM digunakan untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia pada suatu wilayah. Pada dasarnya IPM merupakan indeks yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja

pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Meskipun IPM tidak dapat mengukur seluruh dimensi dari pembangunan, namun IPM mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Keterangan:

X1 = Indeks Kesehatan

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

2.1.1.3 Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

Klasifikasi pembangunan manusia memiliki tujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia yang sama. Untuk melihat capaian indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan tabel 2.1 yang menunjukkan pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi IPM

Nilai IPM	Status
$IPM < 60$	Rendah
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
$IPM \geq 80$	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.1.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran kemajuan pembangunan manusia oleh IPM dilakukan melalui pendekatan tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan hidup layak. Masing-masing dimensi memiliki indikator sebagai alat ukurnya, adapun komponen-komponen indikator yang digunakan untuk mengukur IPM adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Kesehatan dan Umur Panjang

Dimensi kesehatan dan umur panjang diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Umur Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah, karena semakin baik kesehatan seseorang maka semakin cenderung orang tersebut untuk hidup lebih lama. Untuk mengukur indeks kesehatan dan umur panjang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Keterangan:

Ikesehatan = Indeks kesehatan

UHH = Umur harapan hidup

UHHmin = Umur harapan hidup terendah

UHHmaks = Umur harapan hidup tertinggi

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Untuk mengukur indeks pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLSL}}{2}$$

Keterangan:

Ipendidikan = Indeks komponen pendidikan

HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata-rata lama sekolah

c. Standar Hidup Layak

Untuk mengukur standar hidup layak secara ekonomi, dalam perhitungan IPM digunakan data konsumsi per kapita riil yang disesuaikan untuk mengukur

kemampuan daya beli penduduk. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk mendapatkan data pengeluaran daripada data pendapatan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rumus yang digunakan dalam mengukur indeks adalah sebagai berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{P - P_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

Keterangan:

$I_{pengeluaran}$ = Indeks pengeluaran

P = Angka pengeluaran

P_{min} = Angka pengeluaran terendah

P_{max} = Angka pengeluaran tertinggi

2.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi (Bappenas, 2014). Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) (BPS, 2011). Rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah, maka semakin tinggi pula

jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Sukirno (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Jhingan (2004), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan

kemampuan dari suatu perekonomian pada suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah digunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. BPS (2009) mendefinisikan PDRB sebagai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita. Sedangkan PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut BPS (2003), untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran:

1. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB dengan menggunakan pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan:

$Q_1, Q_2, Q_3,$ dan Q_n = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

$P_1, P_2, P_3,$ dan P_n = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB berdasarkan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = r + w + i + p$$

Keterangan:

r = balas jasa pemilik tanah

w = balas jasa pemilik tenaga kerja

i = balas jasa pemilik modal

p = balas jasa pengusaha

3. Pendekatan Pengeluaran

Dalam pendekatan pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Adapun rumus untuk menghitung PDRB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berikut ini adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik ini dikembangkan sejak abad ke-17. Terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh terhadap pemikiran teori klasik ini, yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith

Adam Smith mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total dilakukan dengan tiga variabel, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan capital atau modal. Sedangkan untuk faktor kedua, yakni pertumbuhan penduduk, digunakan untuk menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo

Pemikiran David Ricardo dalam hal pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal adalah tentang *the law of diminishing return*. Pemikirannya ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. David Ricardo berpendapat bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

2. Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Teori ini merupakan teori yang menunjukkan sisi permintaan. Dalam teori ini dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada hanya akan berlaku saat pengeluaran agregat, melalui kenaikan investasi yang bertambah secara

berkelanjutan pada tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan. Harrod-Domar menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai yaitu:

- a) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh
- b) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional
- c) Rasio modal-produksi nilainya tetap
- d) Perekonomian terdiri dari dua sektor

Dalam analisis mereka menunjukkan bahwa walaupun pada suatu tahun tertentu barang-barang modal telah mencapai kapasitas penuh, namun pada pengeluaran agregat akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun periode selanjutnya. Atau dengan kata lain, investasi yang ada pada tahun tersebut akan menambah kapasitas barang modal pada tahun berikutnya.

3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Dalam teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, dua tokoh yang paling populer adalah Joseph A. Schumpeter dan Robert Solow.

a. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Joseph A Schumpeter

Dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Economic Development*, Joseph A Schumpeter membahas mengenai peran pengusaha dalam pembangunan. schumpeter menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan ekonokmi pada dasarnya adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para innovator dan wirausahawan.

b. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Robert Solow

Robert Solow berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersumber kepada empat faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

4. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory) merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang muncul pada akhir tahun 1980-an. Teori ini dirintis oleh Romer (1986) dan Lucas (1989). Teori pertumbuhan endogen yang menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Menurut Kuncoro (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor

terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, namun sumber daya alam tanpa dukungan sumber daya manusia tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi. Sebagian Negara berkembang hanya bertumpu pada sumber daya alam tanpa didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, hal ini lah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di sebagian Negara berkembang. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya adalah kekayaan laut, barang tambang, mineral, hasil hutan, dan sebagainya.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh teknologi-teknologi canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Budaya

Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi. Budaya positif akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan budaya negatif akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

5. Sumber Daya Modal

Dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sumber daya modal sangat dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam, sumber daya modal biasanya berupa mesin-mesin atau peralatan penunjang. Pengolahan sumber daya alam yang sangat tradisional tanpa bantuan peralatan penunjang yang cukup akan menghambat produktivitas. Produktivitas yang rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan penduduk atau *dependency ratio* merupakan perbandingan penduduk yang berusia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk yang berusia produktif (berusia antara 15 hingga 64 tahun). Rasio Ketergantungan penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan penduduk dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara berkembang.

Semakin tinggi rasio ketergantungan penduduk, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Sedangkan apabila rasio ketergantungan penduduk rendah, maka akan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang

tidak produktif. Adapun untuk mengetahui rasio ketergantungan penduduk dapat dilakukan dengan menggunakan sebagai berikut:

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{(65+)}}{P_{(15-65)}} \times 100$$

Keterangan:

RK = Rasio Ketergantungan Penduduk

P₍₀₋₁₄₎ = Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

P₆₅₊ = Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun ke atas)

P₍₁₅₋₆₄₎ = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)

2.1.5 Kemiskinan

2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. BPS (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Menurut Bappenas (2005), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan berbagai pengertian kemiskinan yang

telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ekonomi dimana seseorang memiliki penghasilan yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak. Untuk mengetahui persentase penduduk miskin, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Keterangan:

P_0 = Persentase penduduk miskin

Z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

2.1.5.2 Penyebab Kemiskinan

Dari berbagai pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu (Bappenas, 2018):

- Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.

- Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang
- Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat.
- Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas.

2.1.5.3 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan memiliki bentuk yang beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut paling

banyak digunakan sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena terdapat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, boros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif bergantung kepada pihak lain.

4. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan akibat rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi dalam suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel berikut ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadikan landasan berpikir penulis, untuk memperluas informasi mengenai ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan penulis dalam penyusunan skripsi ini, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian sebelumnya
Sururi Sururi, Dewi Septiyani: <i>“The Influence of Gross Regional Domestic Product on Mean Years of Schooling”</i> , 2019.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Barat.	Jika nilai PDRB kecil maka tidak berpengaruh terhadap RLS. Kecilnya nilai PDRB tidak menarik minat masyarakat untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal. Namun, RLS memiliki hubungan dengan PDRB. Jika RLS meningkat atau sebaliknya akan mempengaruhi nilai PDRB. Begitu pula sebaliknya, jika PDRB meningkat atau menurun akan memungkinkan untuk mempengaruhi RLS.	Penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel rasio ketergantungan penduduk dan tingkat kemiskinan. Tahun penelitian berbeda.

<p>Damrul Ahmad, Mike Triani: "Analisis Kausalitas Antara Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat", 2019.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kausal antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pendidikan di Sumatera Barat.</p>	<p>Hasil penelitian mrenunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan, selain itu ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi tingkat pendidikan, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.</p>	<p>Penelitian ini tidak menganalisis hubungan kausalitas, penelitian ini tidak menggunakan variabel ketimpangan pendapatan. Penelitian sebelumnya tiak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan rasio ketergantungan. Lokasi dan tahun penelitian berbeda.</p>
---	---	--	--

<p>Moh. Yamin, Suyidno, Syahlan Mattiro: “Kajian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar”, 2015.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh tingkat kemiskinan penduduk, beban ketergantungan penduduk, dan jarak sekolah terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, beban ketergantungan penduduk, dan jarak sekolah memiliki pengaruh yang negatif terhadap rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar. Masyarakat ekonomi bawah dan menengah menyatakan kurang mampu membiayai pendidikan, karena biaya pendidikan dan keterbatasan ekonomi, semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin merasa tidak mampu membiayai pendidikan, dan sebagian besar orang tua terbebani putra-putrinya bersekolah karena keterbatasan dan biaya sarana transportasi.</p>	<p>Penelitian ini tidak menggunakan variabel jarak sekolah. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi. Lokasi dan tahun penelitian berbeda.</p>
---	---	---	--

<p>Dina Hernita Lestari, Andryan Setyadharma: “<i>Determinant Mean Years of Schooling in Central Java</i>”, 2019.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2017.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah berpengaruh tidak signifikan terhadap rata-rata lama sekolah, pekerja anak memiliki efek negatif dan signifikan terhadap rata-rata lama sekolah, BOS memiliki efek tidak signifikan pada rata-rata lama sekolah, pendapatan per kapita memiliki efek positif dan signifikan terhadap rata-rata lama sekolah, sedangkan tingkat kemiskinan memiliki efek negatif dan signifikan pada rata-rata lama sekolah.</p>	<p>Penelitian ini tidak menggunakan variabel pekerja anak, BOS, dan pendapatan per kapita. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan rasio ketergantungan penduduk. Lokasi dan tahun penelitian berbeda.</p>
<p>Ginanjar Agung Rahmadi, M. Pudjihardjo: “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Bidang Pendidikan”, 2020.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal, serta variabel lain yaitu PDRB per kapita dan Kemiskinan terhadap</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah. Sedangkan DAK, dan Belanja Daerah Fungsi Pendidikan berpengaruh positif</p>	<p>Penelitian ini tidak menggunakan variabel PAD, DAK, dan belanja daerah fungsi pendidikan. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel PDRB perkapita, penelitian ini menggunakan variabel</p>

	<p>kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan yang diwakili Rata-rata Lama Sekolah (RLS).</p>	<p>signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah. PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah.</p>	<p>PDRB. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel rasio ketergantungan penduduk. Lokasi dan tahun penelitian berbeda.</p>
<p>Ummy Zulfa Rahmatin, Ady Soejoto: “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya”, 2017.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memprediksikan pengaruh sosial-ekonomi melalui tingkat kemiskinan dan jumlah ksekolah terhadap APS.</p>	<p>Hasil uji regresi menunjukkan, tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan sebesar 55,33% di mana pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah sebesar 22,62% dan 32,71%. Peningkatan kemiskinan diikuti oleh penurunan APS dan sebaliknya. Begitu pula kenaikan jumlah sekolahakan diikuti oleh penurunan APS.</p>	<p>Penelitian ini tidak menggunakan variabel APS melainkan RLS, tidak menggunakan variabel jumlah sekolah. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan rasio ketergantungan penduduk. Lokasi dan tahun penelitian berbeda.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berjalan secara berkelanjutan guna mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama dari pembangunan adalah terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakatnya untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.

UNDP memperkenalkan suatu paradigma baru mengenai konsep pembangunan yang disebut dengan paradigma pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar penduduk mampu memiliki lebih banyak pilihan sehingga dapat hidup dengan layak. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia, terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia menitik beratkan kepada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur dengan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS),

Untuk terus meningkatkan kualitas manusia dapat dilakukan dengan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia adalah rata-

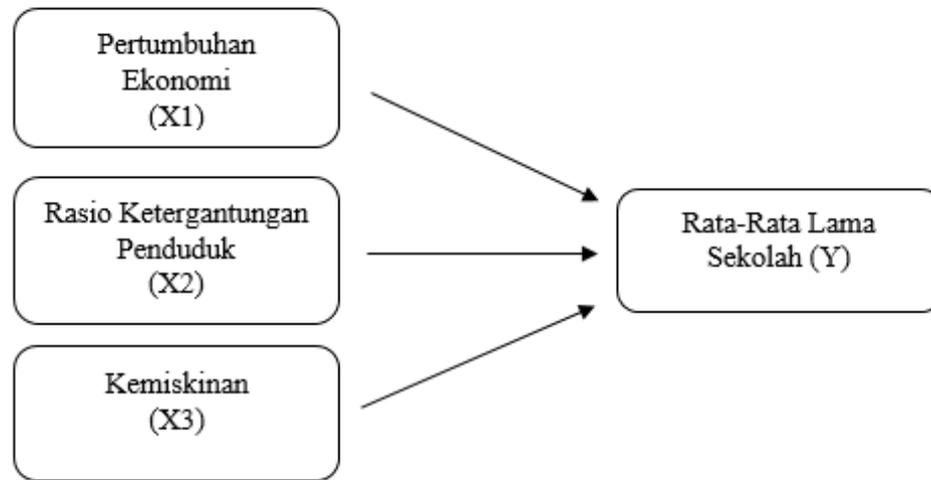
rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam IPM yang mengukur seberapa lama masyarakat telah menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah pada suatu wilayah dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan penduduk, dan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Menurut Gunanjar (2020), kenaikan PDRB mengindikasikan kenaikan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk pula untuk memenuhi biaya-biaya dalam memperoleh pendidikan formal, sehingga rata-rata lama sekolah akan meningkat.

Rasio ketergantungan penduduk dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap rata-rata lama sekolah. Mengingat setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup, maka besarnya tanggungan keluarga akan mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga maupun kemampuan untuk membiayai pendidikan putra putrinya sampai pada jenjang yang diinginkan (Moh. Yamin, 2013).

Hubungan kemiskinan dengan rata-rata lama sekolah akan berbanding terbalik. Ahmad (2018) menyatakan bahwa hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan masyarakat miskin dalam membiayai biaya pendidikan sehingga kondisi kemiskinan menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan variabel-variabel tersebut dapat dilihat lebih lanjut melalui gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis sementara yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga rasio ketergantungan penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat.